

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk menganalisis pengaruh modal manusia (Rata-Rata Lama Sekolah/RLS), akumulasi kapital domestik (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN), dan tekanan demografi (Kepadatan Penduduk) terhadap ketimpangan wilayah maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh secara parsial yaitu positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia selama periode tahun 2016–2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia secara agregat telah mengalami peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah dari tahun ke tahun, manfaat dari peningkatan modal manusia tersebut tidak tersebar secara merata antarwilayah. Akumulasi modal manusia yang berkualitas cenderung terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang telah berkembang, sementara daerah tertinggal masih menghadapi keterbatasan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fenomena *brain drain* atau arus keluarnya tenaga kerja terdidik dari wilayah tertinggal ke wilayah maju memperkuat *polarization effect* Hirschman, sehingga justru memperlebar jurang ketimpangan antarwilayah.
2. variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsentrasi investasi domestik yang terpusat di beberapa wilayah tertentu, khususnya di Pulau Jawa, justru memperburuk ketimpangan pembangunan antarwilayah. Mekanisme *path-dependency*

dalam teori Hirschman menjelaskan bahwa wilayah yang sudah memiliki basis industri, infrastruktur memadai, dan pasar yang dalam akan terus menjadi magnet bagi arus modal baru, sementara wilayah tertinggal menghadapi perangkat keseimbangan rendah (*low-equilibrium trap*) yang semakin memperlebar kesenjangan.

3. Selain itu, variabel Kepadatan Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk yang tinggi justru berperan menekan ketimpangan wilayah melalui terciptanya *agglomeration economies*. Wilayah dengan kepadatan tinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah memiliki pasar tenaga kerja yang lebih besar dan beragam, mendorong spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih efisien, serta memfasilitasi difusi teknologi dan pengetahuan. Biaya per kapita untuk penyediaan pendidikan, kesehatan, *transportasi*, dan utilitas menjadi lebih rendah karena jumlah pengguna yang banyak, sehingga pemerintah daerah mampu menyediakan layanan publik yang lebih merata. Sebaliknya, wilayah berpenduduk jarang menghadapi biaya distribusi tinggi, pasar lokal terbatas, dan rendahnya daya tarik investasi swasta, sehingga pembangunan ekonomi sulit berkembang dan ketimpangan relatif terhadap wilayah padat semakin melebar.
4. Variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Kepadatan Penduduk berpengaruh secara simultan terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia selama periode tahun 2016–2023. Hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa berdasarkan uji simultan menggunakan uji F menunjukkan nilai probabilitas 0,000000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga seluruh variabel independen secara bersama-

sama mempengaruhi tingkat ketimpangan wilayah di Indonesia. Selain itu, nilai koefisien determinasi ($\text{Adjusted } R^2 = 0,526446$) menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan variasi ketimpangan wilayah sebesar 52,64%, sementara sisanya 47,36% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Oleh karena itu, pemerataan distribusi investasi domestik, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja di daerah asal, serta pengelolaan tekanan demografi yang lebih terencana perlu dilakukan secara terintegrasi agar upaya pengurangan ketimpangan wilayah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Pusat (Bappenas dan Kementerian Keuangan), disarankan untuk merancang kebijakan redistribusi fiskal yang lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan kondisi modal manusia, kapital, dan demografi secara simultan dalam formula Dana Transfer ke Daerah. Pemerataan realisasi PMDN ke provinsi-provinsi di luar Jawa perlu didorong melalui pemberian insentif investasi berbasis wilayah tertinggal, percepatan pembangunan kawasan ekonomi khusus di kawasan timur Indonesia, serta penyederhanaan regulasi perizinan di daerah yang masih memiliki daya saing investasi rendah. Dengan demikian, mekanisme *polarization effect* Hirschman yang selama ini memperparah ketimpangan dapat diminimalkan.
2. Bagi Pemerintah Daerah, khususnya provinsi-provinsi dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) rendah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Barat, disarankan untuk meningkatkan alokasi anggaran

pendidikan demi mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal. Peningkatan RLS perlu diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang sesuai di daerah asal agar tenaga kerja terdidik tidak bermigrasi ke wilayah lain, sehingga manfaat investasi pendidikan dapat dirasakan langsung oleh daerah yang bersangkutan dan tidak memperparah ketimpangan melalui fenomena *brain drain*.

3. Bagi Kementerian Investasi/BKPM, disarankan untuk mendorong pemerataan distribusi PMDN yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia melalui program promosi investasi yang lebih aktif di daerah tertinggal, pembangunan infrastruktur konektivitas yang menghubungkan sentra produksi dengan pasar, serta pemberian kemudahan berusaha yang kompetitif di luar Pulau Jawa. Pemerataan investasi ini penting agar pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari akumulasi kapital dapat bersifat inklusif dan berkontribusi pada pengurangan ketimpangan antarwilayah, bukan sebaliknya memperkuat *path-dependency* yang telah ada.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah, seperti pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB per kapita), pengeluaran pemerintah daerah (belanja modal), tingkat kemiskinan, infrastruktur (panjang jalan), dan indeks pembangunan manusia (IPM) agar analisis menjadi lebih komprehensif. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat memperpanjang periode penelitian, memperdalam unit analisis ke tingkat kabupaten/kota, atau menggunakan metode analisis spasial untuk mengungkap pola ketimpangan yang lebih rinci dan dinamis.

5.3 Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, implikasi hasil penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan dukungan empiris terhadap relevansi Teori Ketimpangan Regional yang dikemukakan oleh Albert O. Hirschman (1958), khususnya mekanisme *polarization effect* yang masih sangat dominan dalam menjelaskan persistensi ketimpangan antarprovinsi di Indonesia selama periode 2016–2023. Temuan bahwa RLS dan PMDN berpengaruh positif terhadap ketimpangan mengkonfirmasi bahwa akumulasi modal manusia dan kapital yang tidak merata justru memperkuat sentralisasi sumber daya di wilayah maju, sejalan dengan prediksi Hirschman mengenai dominasi efek polarisasi dalam jangka menengah.

Selain itu, temuan mengenai pengaruh negatif kepadatan penduduk terhadap ketimpangan memperkuat relevansi teori aglomerasi Henderson (2003) yang menekankan peran *agglomeration economies* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Secara keseluruhan, penelitian ini menambah bukti empiris terbaru dalam literatur ekonomi regional Indonesia bahwa interaksi simultan antara modal manusia, kapital domestik, dan demografi merupakan determinan ketimpangan spasial yang kompleks dan tidak dapat dikaji secara terpisah-pisah, melainkan perlu dianalisis secara terpadu dalam satu kerangka model.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pemerataan distribusi investasi (PMDN) ke seluruh wilayah Indonesia merupakan faktor kunci dalam upaya mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Kebijakan yang hanya berfokus pada peningkatan total investasi nasional tanpa memperhatikan distribusi spasialnya justru berpotensi memperburuk ketimpangan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan investasi yang secara eksplisit mempertimbangkan dimensi kewilayahan, dengan memberikan afirmasi kepada provinsi-provinsi tertinggal agar dapat bersaing dalam menarik modal domestik.

Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan yang diukur melalui RLS perlu diimbangi dengan kebijakan ketenagakerjaan yang mampu menciptakan lapangan kerja produktif di daerah asal, sehingga efek positif dari peningkatan modal manusia tidak hilang akibat migrasi tenaga kerja ke pusat-pusat ekonomi. Pemerataan distribusi penduduk melalui program transmigrasi yang lebih terencana dan berbasis potensi ekonomi daerah juga dapat menjadi instrumen kebijakan yang efektif untuk mengoptimalkan manfaat kepadatan penduduk sebagai pendorong *agglomeration economies* di wilayah-wilayah yang saat ini masih jarang penduduknya namun memiliki potensi sumber daya alam yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amali, F. N. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan 33 Provinsi di Indonesia. **Jurnal Ekonomi Trisakti**, 3(1), 815-820. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15424>
- Astrawan, R. (2025). Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. **Jurnal Ekonomi**, 10(1), 33-41. <https://jurnal-ekonomi.uho.ac.id/index>.
- Azim, A. N., Sutjipto, H., & Ginanjar, R. A. F. (2022). Determinan ketimpangan pembangunan ekonomi antarprovinsi di indonesia. **Jurnal Riset Ilmu Ekonomi**, 2(1), 1-16. <https://doi.org/10.23969/jrie.v2i1.23>
- Arafah, M., & Khoirudin, R. (2022). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. **JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan**, 5(2), 628-636.
- Bps. (2022). *Population Density By Province (Person/Sq.Km), 2021*. [Internet]. [Diakses 10 April 2026]. <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/2/mtqxizi=/Kepadatan-Penduduk-Menurut-Provinsi--Jiwa-Km2-.html>
- Budyandra. (2019). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Antarkabupaten / Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017*. 2017, 424–429. [Internet]. [Diakses 10 April 2026]. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.26>
- Dwiputra, R. M. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (Periode 2011-2016). **Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB**, 6(2).
- Hanifah Et Al. (2019). **Penerapan Metode Weigthed Least Square Pada Analisis Regresi Linear**. 105–114. <https://ejournal.upi.edu/index.php/jem/article/view/11199>
- Janah, M. (2022). Analisis pengaruh tingkat pdrb perkapita, indeks pembangunan manusia, dan penanaman modal asing terhadap ketimpangan pendapatan di indonesia periode tahun 2019-2021. *Profit: jurnal manajemen, bisnis dan akuntansi*, 1(4), 23-43. <https://doi.org/10.58192/profit.v1i4.183>
- Kuciswara, D., Muslihatinningsih, F., & Santoso, E. (2021). Pengaruh urbanisasi, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(3), 1-9. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i3.16307>
- Lestari, P. I., Robiani, B., & Sukanto, S. (2023). Kemiskinan ekstrem, ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. **EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis**, 11(2), 1739-1752.

<https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.4789>

- Lubis, ZH, Silaban, LDY, Panjaitan, CT, & Marpaung, OD (2025). Pengaruh Rata Rata Lama Sekolah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara: Penelitian. ***Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan***, 4 (1), 7115-7120.
- Lanaya Husnul Safriana. (2024). ***Jurnal Tata Sejuta Stia Mataram Manufacturing Companies Listed On The Indonesia***. 10(2). <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v10i2>
- Lubis, Z. H., Damai, L., Silaban, Y., & Panjaitan, C. T. (2025). *Pengaruh Rata Rata Lama Sekolah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara*. 4(1), 7115–7120. [Internet]. [Diakses 10 April 2026]. [Internet]. [Diakses 10 April 2026]. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2840>
- Lukman Harun. (2012). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur)*. 1, 21–24.
- Mandei, J. (2020). Analisis ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Agri-Sosioekonomi*. [Internet]. [Diakses 10 April 2026]. <https://doi.org/10.35791/AGRSOSEK.16.3.2020.31093>
- Malamassam. (2022). *Spatial Structure Of Youth Migration In Indonesia : Does. Applied Spatial Analysis And Policy*, 1045–1074. [Internet]. [Diakses 10 April 2026]. <https://doi.org/10.1007/S12061-022-09434-6>
- Mardhiah, N., Debby, A., Marcela, R., Saputra, J., & Muhammad, Z. (2023). *International Journal Of Advances In Social Identifying The Impact Of Transmigration Policy On Local Community : A Case Study Of Sigulai Village , Simeulue Regency , Indonesia*. 2(May), 132–143.
- Mobonggi, I. D., Achmad, N., & Hasan, I. K. (2022). *Analisis Regresi Data Panel Dengan Pendekatan Common Effect Model Dan Fixed Effect Model Pada Kasus Produksi*. 2(2), 52–67. [Internet]. [Diakses 10 April 2026]. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/intv/article/view/6516>
- Mustakim, A. (2025). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah Di Provinsi Sulawesi Tenggara Corresponding Author : Al Mustakim 1 Teori Pembangunan Ekonomi . Corresponding Author : Al Mustakim 2. 10, 1–11. [Internet]. [Diakses 10 April 2026]. <https://doi.org/10.33772/jpep.v10i1.1201>
- Nuraini, I. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. ***Jurnal Ilmu Ekonomi***.

- Noto, G. H. (2016). Analisis Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014. ***Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 4(2)***.
- Ningsih, A. R., Mentari, S., Julyanto, R., & Dewi, O. S. (2022). **The Development Of Educational Human Resources Through Indonesia ' S Education System. 334–345**. <https://doi.org/10.55324/iss.v1i4.70>
- Nurhasanah, L., & Muzdalifah, M. (2024). Pemicu Ketimpangan Pendapatan di Regional Kalimantan Tahun 2015-2020. ***JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 7(1), 31-40***.
- Pangkiro, H. A., Rotinsulu, D. C., & Wauran, P. (2016). Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap tingkat ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara. ***Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(1)***.
- Roselin, R., Nainggolan, E., Pemerintahan, I., Negeri, D., Ir, J., Km, S., & Jatinangor, K. (2024). Studi Kasus Propinsi Jawa Barat I . Pendahuluan Munculnya Teori-Teori Yang Terkait Dengan Lokasi Industri Dalam Efisiensi Ekonomi Merupakan Upaya Pencarian Terhadap Alasan Mengapa Dan Dimana Aktifitas Ekonomi Berada (Van Oort Et Al ., 2012). Weber Merupa. 9(November), 230–251. [Internet]. [Diakses 10 April 2026]. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v9i2.4210>
- Sari, P. H. (2025). *Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di Indonesia periode 2012-2023 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia)*. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol3.iss2.art12>
- Salsabila, N. A., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. ***EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 2(2), 436-445***. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i2.1586>
- Sondakh, C. A., Rorong, I. P. F., & Sumual, J. I. (2023). Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Empat Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. ***Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 23(4), 1–12***. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/download/53722/45310/129535>
- Sugiyono. (2019). ***Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D***.
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah Di Indonesia. 6, 115–130. [Internet]. [Diakses 10 April 2026]. <https://doi.org/10.14710/Jwl.6.2.115-130>.
- Suparman, S., & Muzakir, M. (2023). *Cogent Economics & Finance Regional Inequality , Human Capital , Unemployment , And Economic Growth In Indonesia : Panel Regression Approach Unemployment , And Economic*

Growth In Indonesia : Panel Regression Approach. Cogent Economics & Finance, 11(2). [Internet]. [Diakses 10 April 2026]. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2251803>

Syaifudin, R., Alfarisi, M. S., Stephanie, G., Putri, R., Jabbar, A., Malik, A., & Zulfa, F. N. (2024). *Determinan Ketimpangan Wilayah Di Indonesia Tahun 2012 – 2022 : Pendekatan Analisis Panel Dinamis*. 5(2). [Internet]. [Diakses 10 April 2026]. <https://doi.org/10.47065/Jbe.V5i2.5143>

Syaifudin, R., Alfarisi, M. S., Stephanie, G., Putri, R., Jabbar, A., Malik, A., & Zulfa, F. N. (2024). *Determinan Ketimpangan Wilayah Di Indonesia Tahun 2012 – 2022 : Pendekatan Analisis Panel Dinamis*. 5(2). [Internet]. [Diakses 11 April 2026]. <https://doi.org/10.47065/Jbe.V5i2.5143>

Wahyuni, R. Dan. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dalam Negeri, Indeks Pembangunan Manusia Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Indonesia Tahun 2013 – 2022 [Internet]. [Diakses 11 April 2026]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/dspace.uui.ac.id/123456789/51321>

Widarjono, A. (2016). **Modul 1. 1–43.**

Wibowo, K. P., & Pangestuty, F. W. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. ***Journal of Development Economic and Social Studies***, 2(3), 539-549. <https://jdess.ub.ac.id/index.php/jdess>